



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizal Latuconsina, SH. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2024 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2024

Pihak Kedua,



Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,



M. Rizal Latuconsina, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671104 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Kualitas Informasi Ketenagakerjaan	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	100% 44,55
2	Meningkatnya Kompetensi dan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5% 8,9%
3	Meningkatnya kondusifitas hubungan kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, bStruktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	9,0%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan Perundangan Bidang ketenagakerjaan	79,34%
5	Mendorong Pengembangan Wilayah dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan difasilitasi pelayanan sosial budaya	40%
6	Meningkatnya kemandirian masyarakat kawasan transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi lokal dan regional yang diberdayakan	40 Kelompok
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 2.637.145.537	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 261.277.000	APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 131.854.000	APBD
4	Program Hubungan Industrial	Rp 251.797.000	APBD
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 1.269.469.800	APBD
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 150.000.200	APBD

Ambon, Maret 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku,

Gubernur Maluku,

Murad Ismail




M. Rizal Latuconsina, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196711041996031004

